

DISRUPSI NON-KINETIK ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL DALAM PENANGGULANGAN EKSTRIMISME KEKERASAN DI KOTA BIMA

Akhyar¹, Rahmad Hidayat², Ansyari Lubis³

Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Mbojo Bima
Email : akhyarstisip@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini berkonsentrasi membahas kontribusi aktor non-negara dalam penanggulangan ekstrimisme kekerasan di Kota Bima. Melalui pendekatan penelitian kualitatif, penulis hendak mengungkap ragam disrupsi non-kinetik yang dilakukan FKUB Kota Bima untuk meniadakan eksistensi segala bentuk tindakan radikal di ranah lokal. CVE yang menekankan keutamaan partisipasi lembaga privat dalam kontra-radikalisisasi, pada konteks tulisan ini telah terejawantah dalam rangkaian aktivitas FKUB Kota Bima berbasis pendekatan non-kinetik untuk menyebarluaskan pemahaman tentang demokrasi, binadarmai, inklusi sosial, atau nirkekerasan kepada khalayak ramai. Dengan kata lain, disrupsi non-kinetik yang diterapkan organisasi masyarakat sipil ini terbilang efektif mendayagunakan pendekatan organisatoris dan personal dalam berinteraksi dengan subyek-subyek yang terlibat maupun tidak terlibat dalam aksi ekstrimisme kekerasan di wilayah setempat.

Kata Kunci: disrupsi, ekstrimisme, kekerasan, non-kinetik, privat.

LATAR BELAKANG

Luluh-lantaknya World Trade Center (WTC) dan Pentagon di Amerika Serikat pada 11 September 2001 lalu akibat aksi pengeboman yang sengaja dilakukan oleh Kelompok Radikal Islam bernama "Al Qaeda" di bawah kepemimpinan Osama bin Laden, menjadi penanda penting meningkatnya perhatian negara-negara di seluruh dunia terhadap bahaya desktruktif terorisme, radikalisme, dan/atau kekerasan ekstrimisme bagi kehidupan umat

manusia. Gagasan "*Global War on Terrorism*" kemudian muncul sebagai reaksi diskursif sekaligus reaksi taktis semua pemerintah di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, guna meniadakan eksistensi segala bentuk tindakan radikal di negaranya masing-masing. Gagasan ini menggaris-bawahi sebuah pesan penting bahwa penciptaan keamanan domestik sebuah negara agar terbebas dari ancaman terorisme merupakan tanggung-jawab internasional yang harus diupayakan

melalui jalinan kerjasama kontra-terorisme antarnegara.

Selain fokus pada penggunaan instrumen keras berupa diplomasi represif, sanksi ekonomi, serta penerbitan undang-undang yang memberikan kekuasaan dan keleluasaan sangat besar kepada negara untuk mengawasi (sekaligus menghakimi) aksi-aksi warga negara yang bermuatan terorisme melalui perangkat intelejen, kepolisian, militer, dan pengadilan, instrumen "lunak" berupa langkah-langkah pencegahan pun turut dilakukan guna menciptakan perdamaian abadi dan kehidupan tanpa ekstrimisme.

Ekstrimisme mencerminkan ideologi politik yang menentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip inti masyarakat. Dalam konteks demokrasi liberal, istilah ini dapat diterapkan pada setiap ideologi yang mendukung supremasi ras atau agama dan/atau menentang prinsip-prinsip inti demokrasi dan manusia universal. Ekstrimisme juga dapat digunakan untuk menggambarkan metode di mana aktor politik berusaha untuk mewujudkan tujuan mereka, yakni dengan menggunakan sarana yang menunjukkan ketidakpedulian terhadap kehidupan, kebebasan, dan hak asasi manusia orang lain (Scruton, dalam Neumann, 2010: 12).

Ragam langkah penanggulangan ekstrimisme kekerasan oleh berbagai pihak ini dirumuskan esensinya melalui terminologi khusus seperti *Countering Violent Extremism* atau *Preventing Violent Extremism* yang

menekankan signifikansi pemakaian instrumen lunak dan kemitraan multi-pihak sebagai strategi ampuh kontra-terorisme.

Di tahun 2015, penggunaan CVE oleh aktor-aktor negara di seluruh dunia semakin populer lantaran daya tariknya sebagai komponen krusial strategi kontra-terorisme yang berkesinambungan dalam rangka merespon radikalisme Al Qaeda. Oleh karena ekstrimisme kekerasan tidak lagi hanya dikaitkan dengan serangan teroris individual, melainkan juga konflik destruktif (yang menimbulkan kematian dan korban luka-luka), maka CVE dimaksudkan untuk merawat kerjasama (pertukaran) antaraktor secara lebih erat dalam domain pencegahan dan manajemen konflik. Ide yang melatari penerapan CVE adalah bahwa ekstrimisme tidak harus diperangi secara eksklusif dengan perangkat intelejen, polisi, dan militer. Sebab-sebab struktural ekstrimisme kekerasan seperti intoleransi, kegagalan pemerintah, dan marginalisasi politik-ekonomi-sosial juga harus diberikan porsi besar penanganannya (Frazer & Nunlist, 2015: 1).

CVE menekankan pendekatan kolaboratif dan multi-disiplin melalui kemitraan pemerintah dengan pemerintah negara lain, organisasi non-pemerintah, kelompok industri, dan masyarakat sipil (Huq, 2008; Kokoda Foundation, 2008; Wilkinson, 2001. Dalam Nasser-Eddine, Garnham, Agostino, & Caluya, 2011: 17). Ia mencakup kebijakan, program, dan

intervensi yang didesain untuk mencegah individu-individu terjerembab dalam aksi kekerasan berlatar ideologi politik, sosial, budaya, dan agama bersifat radikal. Strategi CVE berupaya memperluas pemahaman tentang bagaimana dan mengapa individu terlibat dalam ekstrimisme kekerasan (Holmer, 2013: 1).

Oleh karena itu, CVE dikonklusikan sebagai cara terbaik penanggulangan terorisme melalui pelibatan dan pemberdayaan anggota-anggota masyarakat guna mengembangkan resiliensi mereka terhadap ekstrimisme kekerasan. Pendekatan berbasis komunitas (*community-based approach*) yang diamanatkan CVE dengan cara memberdayakan mitra-mitra lokal untuk mencegah ekstrimisme kekerasan adalah sangat kontributif menciptakan integrasi atau kohesi sosial (Golan, 2016: 31-32).

Program CVE mencakup berbagai aktivitas yang menakjubkan, mulai dari pesan hingga penjangkauan masyarakat, hingga argumentasi religius, hingga pembangunan ekonomi. Program yang diusulkan di bawah rubrik CVE dapat berkisar dari intervensi individual hingga upaya penulisan ulang naskah untuk keseluruhan masyarakat, mulai dari ekonomi hingga masalah sosial.

CVE telah muncul sebagai tema utama dalam strategi kontra-terorisme pemerintah yang mendasari upaya pencegahan, namun juga menginformasikan unsur-unsur lain

sebagai bagian dari pendekatan multi-dimensi. Dalam hal ini, radikalisme, ekstrimisme dan ekstremisme kekerasan adalah konsep kunci yang menentukan jenis dan tingkat respon tertentu (Brett, Erikson, Sorensen, & Aps, 2015: 12).

Strategi dan inisiatif CVE perlu mengidentifikasi serta berfokus pada individu dan komunitas tertentu yang beresiko dan mempertimbangkan taktik rekrutmen spesifik yang digunakan oleh kelompok ekstrimisbersangkutan. Ragam strategi CVE umumnya diterapkan untuk mengatasi kompleksitas interaksi 3 (tiga) faktor kunci yang menyebabkan seseorang dan kelompok tertentu mengambil bagian dalam aksi terorisme atau kekerasan ekstremisme, yakni faktor pendorong (*push factor*), faktor penarik (*pull factor*), dan faktor pendukung (*enabling factor*) [Brett, Erikson, Sorensen, & Aps, 2015: 15].

Upaya CVE saat ini mengejar dua tujuan, seringkali tanpa membedakan keduanya, yakni (1) pelepasan diri (*disengagement*): individu dibujuk dari partisipasi kekerasan dan dukungan material untuk organisasi serta gerakan ekstrimis yang keras; dan (2) de-radikalasi/kontra-radikalasi (*de-radicalisation/counter-radicalisation*): individu dibujuk untuk tidak mengadopsi ideologi ekstrimis. Dengan kata lain, portofolio CVE mencakup upaya untuk mencegah radikalasi dari mengakar di tempat pertama, kadang-kadang disebut PVE (*Preventing Violent Extremism*). Pertanyaan kunci yang harus diajukan

dan dijawab sebelum menerapkan program CVE/PVE adalah apakah ia berusaha melawan Violence (tindakan kekerasan) melalui pelepasan diri atau Extremism (penerapan ekstrimisme) melalui de-radikalisasi atau kontra-radikalisasi (Berger, 2016: 3).

Selain bersandar pada peran aktif pemerintah (lembaga negara/lembaga publik), CVE menekankan pentingnya keterlibatan atau pelibatan aktor non-negara (privat) seperti organisasi masyarakat sipil dalam penanggulangan ekstrimisme kekerasan. Sebab organisasi masyarakat sipil yang bekerja di bidang pembangunan, hak perempuan, transformasi konflik, pembangunan tata pemerintahan, kebebasan berinternet, dialog antaragama, hak asasi manusia, dan bentuk-bentuk platform dialog lainnya dapat berkontribusi melalui beberapa cara strategis-taktis dalam menangani kondisi yang kondusif bagi penyebaran terorisme (ekstrimisme kekerasan).

Organisasi semacam itu dapat bertindak secara lokal, di lingkungan tertentu misalnya, di tingkat nasional, atau bahkan internasional, berjejaring satu sama lain sebagai gerakan akar rumput yang menyuarakan keluhan masyarakat. Dengan demikian, organisasi-organisasi sejatinya dapat berkontribusi pada: produksi basis sosial untuk demokrasi; promosi akuntabilitas politik; produksi kepercayaan, resiprositas, dan jejaring; penciptaan dan promosi strategi alternatif; serta pemberian dukungan terhadap hak warga negara dan konsep

kewarganegaraan (Pratt, dalam Ginkel, 2012: 7).

Bima, tak terbantahkan, menjadi salah satu wilayah potensial perekrutan kader bagi organisasi-organisasi radikal, sebab setiap peristiwa kekerasan ekstrimisme yang terjadi beberapa tahun terakhir di Indonesia kerap dilakukan oleh kelompok teroris tertentu yang turut melibatkan warga Bima di dalamnya. Sebagaimana terjadi di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia, di Bima pun telah berlangsung sejumlah aksi destruktif yang dilakukan oleh pengikut-pengikut setia MIT atau kelompok radikal lainnya. Kenyataan paling mencengangkan dari rangkaian peristiwa terorisme itu adalah bahwa pelaku-pelakunya tidak lain merupakan warga asli Bima.

Tabel 1: Rentetan Aksi Teror di Bima

Waktu	Peristiwa
30 Juni 2011	Muhammad Sya'ban Abdurrahman, santri pondok pesantren 'Umar bin Khatab', membunuh dengan sebilah pedang seorang petugas Reskrim Polsek Bolo Kabupaten Bima (Brigadir Rokhmad Saefuddin) yang sedang menjalankan tugas patroli. Pelaku dijatuhi hukum penjara selama 15 (lima belas) tahun.
11 Juli 2011	Abrori bin Ali alias Maskadov, pengasuh Pondok Pesantren "Umar bin Khatab" ditangkap aparat kepolisian Bima lantaran sebagian dari 27 (dua puluh tujuh) buah bom pipa rakitan (yang ia sediakan sebagai senjata bagi para santri ketika berjihad) tiba-tiba meledak dan melukai seorang pengajar pondok. Selama tiga hari penuh, dengan bersenjatakan parang dan pedang, sejumlah santri berupaya mencegah aparat kepolisian melakukan investigasi dalam pondok. Ia dijatuhi hukum penjara selama 17 (tujuh belas) tahun pada 29 Maret 2012.
28 Maret 2014	Penembakan terhadap Ipda Hanafi, Kepala Satuan Narkoba Polres Bima (korban selamat meski mengalami luka tembak di bagian perut dan rahang kiri).
2 Juni 2014	Penembakan terhadap Bripka Muhammad Yamin, Kepala Unit Intelkam Polres Bima (korban meninggal dunia).
16 Agustus 2014	Penembakan terhadap AKP Abdul Salam, Kapolda Ambalawi (korban meninggal dunia).

Sumber: Diolah dari berbagai media massa, Agustus 2019.

Meskipun tindakan ekstrimisme di Bima (dan di Indonesia) tidak lagi mencuat ke permukaan selama tiga tahun terakhir ini (2015-2017), bukan berarti jaringan terorisme telah melemah. Kematian teroris terkemuka, Santoso, pada 18 Juli 2016 silam tidaklah tepat diasumsikan sebagai penanda

berakhirnya eksistensi radikalisme dan/atau ekstrimisme di negeri ini. Potensi kebangkitan terorisme selalu ada, sehingga kesadaran dan kewaspadaan berbagai pihak harus senantiasa dipupuk melalui intensifikasi kampanye CVE sebagai "instrumen lunak" yang sangat efektif

dalam rangka penanggulangan ekstrimisme kekerasan.

Lembaga-Lembaga publik seperti Pemerintah Kota Bima, Kepolisian Resort Bima Kota, BNPT Perwakilan Wilayah Kota Bima, dan Komando Distrik Militer Bima tidak tinggal diam terhadap kejahatan kemanusiaan yang satu ini. Meski dalam taraf dan frekuensi yang terbatas, telah ada langkah-langkah penanggulangan dan/atau prevensi yang dilakukan secara terpisah maupun melalui kerjasama multipihak dalam rangka meminimalisir potensi kemunculan aksi terorisme/radikalisme/ ekstrimisme kekerasan di Kota Bima. Upaya non-kinetik yang bertumpu pada proses disruptsi masyarakat dari pengaruh ideologi ekstrim dan keinginan/kesediaan melakukan tindakan teror menjadi terapan inti (strategi CVE) lembaga publik tersebut, dengan menyasar masyarakat umum sebagai subyek intervensi, terutama pada warga-warga kelurahan tertentu yang selama ini dicap sebagai "wilayah sasaran/basis potensial" perekrutan organisasi radikal yakni Kelurahan Melayu dan Kelurahan Penatoi.

Tidak berhenti pada langkah itu, lembaga-lembaga publik inipun menjalin kolaborasi dengan beragam aktor non-negara (institusi privat) seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bima, Forum Umat Islam (FUI) Kota Bima, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bima, Pengurus Daerah (PD)

Muhammadiyah Kota Bima, Pengurus Cabang (PC) Nahdlatul Ulama Kota Bima, dan organisasi masyarakat sipil lain yang concerned terhadap isu penanggulangan ekstrimisme kekerasan. Kemitraan strategis antara lembaga publik dengan lembaga privaat semacam ini mencitrakan karakteristik kepemerintahan kolaboratif (*collaborative governance*) dalam bingkai CVE berorientasi penanggulangan ekstrimisme kekerasan di Kota Bima secara gradual, berkesinambungan, dan resiprokal satu sama lain.

Tulisan ini berkonsetrasi membahas kontribusi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bima sebagai salah satu varian organisasi masyarakat sipil dalam menanggulangi ekstrimisme kekerasan melalui terapan disruptsi non-kinetik untuk menyebarluaskan pemahaman nirkekerasan, binadama, dan/atau inklusi sosial kepada tokoh-tokoh bercitra "ekstrimis" dan masyarakat umum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dekskriptif kualitatif, di mana informan ditentukan dengan teknik *snowball sampling* yakni proses penentuan informan berdasarkan informan sebelumnya tanpa menentukan jumlahnya secara pasti dengan menggali informasi terkait topik penelitian yang diperlukan. Data penelitian ini dikumpulkan melalui teknik

observasi, wawancara, dan dokumentasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat 2 (dua) jenis disrupti yang familiar diterapkan dalam penanggulangan ekstrimisme kekerasan yakni (a) kinetik, artinya membunuh atau menahan orang yang berpartisipasi dalam kegiatan Violent Extremism; dan (b) non-kinetik, yang berarti membujuk orang untuk tidak mengambil bagian dalam kegiatan Violent Extremism.

CVE adalah wujud pendekatan non-kinetik yang menggaris-bawahi signifikasi disrupti keyakinan ekstrimis dan disrupti keinginan melakukan tindakan kriminal (Berger, 2016: 16).

Pada kerangka disrupti non-kinetik untuk penanggulangan ekstrimisme kekerasan, FKUB Kota Bima telah melakukan berbagai upaya penyebarluasan pesan-pesan nirkekerasan, binadama, dan/atau inklusi sosial kepada tokoh-tokoh bercitra “ekstrimis” sekaligus masyarakat umum di wilayah Kota Bima.

Dalam bentuk yang sederhana, organisasi masyarakat sipil yang satu ini rutin menyelenggarakan forum-forum diskusi bertema sangat peka seperti Fiqih Jihad yang menyertakan beragam tokoh lintas organisasi kemasyarakatan seperti JAS, JAT, FUI, Khilafatul Muslimin, atau HTI sebagai narasumber ataupun peserta. Forum tersebut terkadang juga mendiskusikan tema-tema

kebangsaan seperti soal Pancasila dan NKRI.

FKUB Kota Bima Periode 2016-2019, terutama di bawah kendali Bapak Drs. H. Eka Iskandar Zulkarnain, M.Si. secara reguler melaksanakan acara-acara silaturahmi formal yang mempertemukan wakil pemerintah dan aparat keamanan dengan tokoh-tokoh masyarakat. Acara ini kerap diliput media massa lokal.

Direktur PUSAD Paramadina yang notabene merupakan lembaga riset terkemuka di Indonesia pun turut diundang di awal 2019 oleh FKUB Kota Bima untuk mempresentasikan konten buku panduan *Melawan Hasutan Kebencian* (buku terbitan lembaga riset tersebut), berdampingan dengan narasumber perwakilan Kodim dan Polres setempat serta duta ormas Islam tertentu di Kota Bima dalam gelaran seminar formal.

Tidak berhenti pada langkah-langkah itu, secara terpisah, Bapak Eka Iskandar Zulkarnain selaku Ketua FKUB Kota Bima berhasil mendorong setidaknya satu tokoh berpengaruh dari kelompok ekstremis di Kelurahan Penatoi keluar dari jeratan violent extremism dan bersikap lebih terbuka kepada pihak-pihak lain, termasuk pemerintah. Hal ini dimulai ketika beliau membantu istri sang tokoh ketika hendak melahirkan:

“Ketika saya mengetahui istri dari ... tersebut akan melahirkan, saya bantu mereka mulai dari menyiapkan mobil ambulans hingga

pengurusan persalinannya di Rumah Sakit Muhammadiyah Kota Bima. Tidak ada satu perak pun biaya yang dibebankan kepada mereka atas layanan medis tersebut lantaran semua itu telah saya tanggung secara pribadi. Sebelumnya kami tidak mengenal satu sama lain, namun peristiwa persalinan itu menjadi momentum awal perkenalan kami yang berlanjut pada jalinan hubungan baik sampai sekarang. [Wawancara dengan Eka Iskandar Zulkarnain, Ketua FKUB Kota Bima, pada 15 Agustus 2019].

Tindakan-tindakan di atas mencitrakan ikhtiar FKUB Kota Bima untuk membangun binadama secara kreatif dengan memanfaatkan jaringan-jaringan yang ada. Interaksi personal dan organisatoris didayagunakan secara bersamaan untuk menyampaikan pemahaman nirkekerasan, binadama, dan inklusi sosial kepada khalayak ramai.

Contoh kegiatan-kegiatan berskala kecil sebagaimana dilakukan oleh FKUB Kota Bima ini merefleksikan intervensi CVE yang berkonsentrasi pada tujuan praktis dan terukur untuk mendisrupsi proses radikalisasi dan rekrutmen warga biasa oleh kelompok ekstremis tertentu yang dikhawatirkan akan terus berlanjut secara intensif dan massif di Kota Bima. Disrupsi terhadap proses radikalisasi dan rekrutmen tersebut berwujud intervensi dan penyebaran pesan (*messaging*) untuk mengenalkan atau

menyoroti disinsentif terhadap partisipasi material atau tindakan kekerasan, menciptakan hambatan yang mencegah target dari partisipasi penuh dalam kekerasan ekstrimisme.

KESIMPULAN

Wacana “Perang Global terhadap Terorisme (*Global War on Terrorism*)” merefleksikan reaksi diskursif sekaligus taktis semua pemerintah di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, guna meniadakan eksistensi segala bentuk tindakan radikal di negara masing-masing. Gagasan ini menggaris-bawahi sebuah pesan penting bahwa penciptaan keamanan domestik sebuah negara agar terbebas dari ancaman terorisme merupakan tanggung-jawab internasional yang harus diupayakan melalui jalinan kerjasama konterterorisme antarnegara (*international cooperation for countering terrorism*).

Sebagai strategi non-kinetik penanggulangan kekerasan ekstrimisme, CVE (*Countering Violent Extremism*) atau PVE (*Preventing Violent Extremism*) sangat menekankan signifikansi pemakaian instrumen lunak dan kemitraan multi-pihak (kepemerintahan kolaboratif).

Peran aktif pemerintah (lembaga negara/lembaga publik) tidak semata menjadi sandaran pokok dalam CVE, melainkan juga bertumpu pada pentingnya pelibatan aktor non-negara (privat) seperti organisasi masyarakat sipil dalam penanggulangan ekstrimisme kekerasan.

Sebagai salah satu varian organisasi masyarakat sipil, FKUB Kota Bima telah berkontribusi menyebarluaskan pemahaman tentang nilai-nilai fundamental demokrasi bagi masyarakat umum pada konteks lokal. Pendekatan personal dan organisatoris sudah dimanfaatkan sekaligus oleh lembaga privat ini untuk menyemai inklusi sosial, binadama, dan nirkekerasan kepada pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam aksi ekstrimisme kekerasan di Kota Bima.

DAFTAR PUSTAKA

- Berger, J. M. (2016). Making CVE Work: A Focused Approach Based on Process Disruption. *Terrorism and Counter-Terrorism Studies*, (May), 1-40. <https://doi.org/10.19165/2016.1.05>
- Brett, J., Erikson, K. B., Ronn Sorensen, A. K., & Aps, T. C. (2015). Lessons learned from Danish and other international efforts on Countering Violent Extremism (CVE) in development contexts. Retrieved from http://www.netpublikationer.dk/um/evaluation_study_2015_03/Pdf/evaluation_study_2015_03.pdf
- Frazer, O. & C. Nunlist. (2015). The Concept of Countering Violent Extremism. *CSS Analysis in Security Policy*. 183: 1-4.
- Ginkel, v. B. (2012). Engaging Civil Society in Countering Violent Extremism Experiences with the UN Global Counter-Terrorism Strategy. *ICCT Research Paper*. 2(1): 1-14.
- Golan, G. D. (2016). *Countering Violent Extremism: A Whole Community Approach to Prevention and Intervention*. Thesis. California State University, Long Beach.
- Holmer, G. (2013). *Countering Violent Extremism: A Peacebuilding Perspective*. Special Report 336. The United States Institute of Peace. New York.
- Neumann, P. (2010). *Prisons and Terrorism: Radicalisation and De-radicalisation in 15 Countries*. The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence. London-United Kingdom.
- Nasser-Eddine, M., B. Garnham, K. Agostino, & G. Caluya. (2011). *Countering Violent Extremism (CVE) Literature Review*. Edinburgh: Counter Terrorism and Security Technology Centre, Defence Science and Technology Organisation.